

Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional

Indah Pangestu Amaritasari

Hubungan Internasional, Universitas Nasional

E-mail: iamaritasari@gmail.com

Abstract

This article discusses global issues and its relation with national security. Global contemporary issues – drugs, migration, living environment, population, global economy challenges, liberal democracy crisis, fusion and division, small arms production – are issues that emerged as new security threats that transformed since the end of the Cold War. Security threats are no longer in form of “military attacks” that one country does to another, but are acts of crime that are performed by non-state actors and are aimed at state actors, individuals or citizens that ultimately threaten human security. Human security is a new term in response of threats from global contemporary issues. This article concludes that national security in the context of global contemporary issues in an international relations perspective is a complex issue. This is explained in the transnational theory in international relations. United Nations have reassessed the concept of national security which then noted about human security.

Keywords: International relations, human security, national security

Abstrak

Artikel ini membahas tentang isu-isu global dan kaitannya dengan ancaman terhadap keamanan nasional. Isu-isu global kontemporer – obat-obatan (drugs), migrasi, lingkungan hidup, populasi, tantangan ekonomi global, krisis demokrasi liberal, fusi dan pembelahan, produksi senjata ringan – merupakan isu yang lahir sebagai bentuk baru ancaman keamanan yang mengalami transformasi sejak berakhirnya Perang Dingin. Ancaman dalam bentuk baru bukan lagi berupa “serangan militer” yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, tetapi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh aktor non-negara (non-state actor) dan ditujukan kepada negara (state actor), individu atau warga negara yang mengancam keamanan umat manusia (human security). Isu keamanan manusia (human security) merupakan istilah baru dalam merespon ancaman dari perkembangan isu global kontemporer. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa keamanan

nasional dalam konteks isu global kontemporer pada prespektif hubungan internasional adalah hal yang kompleks. Hal ini kemudian dijelaskan dalam teori transnasional dalam hubungan internasional. PBB kemudian memberikan tawaran untuk mengkonseptualisasi kembali pengertian keamanan nasional yang pada akhirnya memberikan masukan mengenai keamanan kemanusiaan (human security).

Kata kunci: Hubungan Internasional, ancaman, human security, keamanan nasional

Pendahuluan

Era global kontemporer dalam hubungan internasional dan politik internasional diawali sejak tahun 1945 namun terjadi perubahan yang drastis sejak berakhirnya Perang Dingin, tahun 1990-an. Isu-isu global kontemporer adalah isu yang berkembang serta meluas setelah Perang Dingin berakhir pada era 1990-an. Pengertian mengenai isu-isu global kontemporer terkait erat dengan sifat dari isu-isu tersebut yang tidak lagi didominasi oleh hubungan Timur-Barat, seperti, ancaman perang nuklir, persaingan ideologi antara Demokrasi-Liberal dan Marxisme-Leninisme, diplomasi krisis, dan sebagainya. Masyarakat internasional kini dihadapkan pada isu-isu global yang terkait dengan “Tatanan Dunia Baru” (*New World Order*). Isu-isu mengenai persoalan-persoalan kesejahteraan ini berhubungan dengan *Human Security* antara negara-negara maju (*developed*) dengan negara-negara berkembang (*developing countries*) serta masalah lingkungan.

Isu-isu global kontemporer merupakan isu yang lahir sebagai bentuk baru ancaman keamanan yang mengalami transformasi sejak berakhirnya Perang Dingin menjadi suatu “Agenda Global Baru” (*New Global Agenda*). Hal inilah yang menjadi latar belakang dari penulisan artikel ini. Metoda pembahasan dalam artikel ini adalah menggunakan metoda argumentatif sehingga di dalam artikel ini akan mengangkat berbagai argumentasi mengenai keamanan nasional dalam konteks isu-isu global kontemporer. Sistematika pembahasan terdiri dari sejarah munculnya isu-isu global kontemporer dalam konteks hubungan internasional, macam dan ciri isu global kontemporer, dan teori-teori hubungan internasional yang berhubungan dengan dampak globalisasi dalam postur keamanan nasional dalam konteks isu-isu global kontemporer.

Sejarah Timbulnya Isu Global Kontemporer

Sejarah kontemporer adalah bagian dari sejarah modern yang menggambarkan periode sejarah dari sekitar 1945 hingga saat ini.¹ Istilah “sejarah kontemporer” telah digunakan setidaknya sejak awal abad ke-19.² Sejarah kontemporer politik didominasi oleh Perang Dingin (1945-1991) antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang efeknya dirasakan di seluruh dunia. Dalam konteks geopolitik ini, tumbangya kerajaan kolonial Eropa di Afrika dan Asia antara tahun 1945 dan 1975 seringkali diikuti oleh konfrontasi Amerika-Soviet dalam bentuk perang proxy dan melalui intervensi dalam politik internal negara-negara yang lebih kecil. Persaingan Amerika-Soviet itu akhirnya berakhir dengan pembubaran Uni Soviet dan Pakta Warsawa pada tahun 1991, menyusul Revolusi 1989. dan pada tahap terakhir dan setelah Perang Dingin membuka jalan bagi demokratisasi sebagian besar Eropa, Afrika, dan Amerika Latin.

Di Timur Tengah, periode setelah 1945 didominasi oleh konflik yang melibatkan negara baru Israel dan munculnya politik minyak bumi, serta pertumbuhan Islamisme setelah tahun 1980an. Periode setelah 1945 melihat pertumbuhan organisasi supranasional pertama pemerintahan, seperti PBB dan Uni Eropa. Secara sosial, negara-negara barat mengalami kenaikan *counter cultures*³ dan revolusi seksual⁴ antara 1960an dan 1980an yang mengubah hubungan sosial dan dipicu oleh Protes 1968.⁵ Standar Hidup (*Standard Living*) meningkat tajam di seluruh dunia terutama di negara-negara maju sebagai akibat dari, yang juga munculnya kekuatan ekonomi baru seperti Jepang dan Jerman Barat. Budaya Amerika Serikat, terutama konsumerisme, menyebar luas. Pada tahun 1960an, banyak negara-negara barat telah memulai proses deindustrialisasi. Di tempat mereka, globalisasi menyebabkan munculnya pusat-pusat industri baru, seperti Jepang, Taiwan dan kemudian Cina, berdasarkan pada ekspor

¹ Brivati, Brian. “Introduction”. In Brivati, Brian; Buxton, Julia; Seldon, Anthony. *The contemporary history handbook* (1st ed.). (Manchester: Manchester University Press, 1996), xvi.

² Misalnya, Edinburgh review, Volume 12 (1808) p. 480.

³ Counter coultures adalah istilah yang merujuk kepada suatu budaya yang berbeda-beda yang berbeda dengan budaya mainstream.

⁴ Revolusi seksual yang dikenal juga sebagai kebebasan seksual adalah pergerakan sosial yang menantang bentuk perilaku tradisional terkait seksualitas dan hubungan interpersonal di seluruh bagian di dunia barat dari tahun 1960an sampai dengan 1980an. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam buku , David Allyn, *Make Love, Not War: The Sexual Revolution: An Unfettered History*. (Little, Brown and Company. 2000)

⁵ Protes tahun 1968 terdiri eskalasi konflik di seluruh dunia terutama ditandai dengan pemberontakan rakyat terhadap elit militer dan birokrasi yang melakukan represi politik.

barang konsumen untuk negara-negara maju. Periode setelah tahun 1945 adalah juga suatu periode transformatif dalam bidang sejarah ilmu pengetahuan karena antara lain muncul teknologi nuklir, biologi molekular, fisika partikel dan lain sebagainya yang menjadi latar belakang munculnya berbagai teknologi yang muncul saat ini termasuk internet.

Sejarah sistem internasional modern sendiri sebenarnya dimulai dalam sejarahnya adalah ketika adanya sistem Westphalia (1648). Negara-negara saling berhubungan satu dengan lainnya di dalam suatu lingkungan yang disebut dengan sistem internasional. Semua negara dianggap memiliki kedaulatan, dan beberapa negara ada yang lebih kuat dari yang lainnya. Sistem memiliki banyak bentuk-bentuk peraturan yang bersifat informal mengenai tentang apa seharusnya yang terjadi, tetapi peraturan ini tidak mengikat. Hubungan internasional ada sejak adanya negara. Akan tetapi sistem internasional modern yang saat ini kita berada, tidak seberapa tua umurnya. Perdamaian yang mengakhiri perang 30 tahun antara negara-negara Katolik dan Protestan di Eropa Barat dan Tengah, menjadi cikal bakal sistem internasional modern. Saat itu dideklarasikan bahwa pemimpin berdaulat dari setiap negara bangsa dapat melakukan apa yang diinginkannya dalam batas wilayahnya dan mendirikan negara sebagai aktor global di dalam politik global. Dari sejak saat itu sampai setelahnya, sistem internasional adalah dalam hubungannya dengan negara bangsa.⁶

Pada abad 17-18 negara bangsa muncul mendominasi di dalam sistem hubungan internasional. Sejumlah negara-negara kuat mendominasi Eropa, dengan beberapa kekuatan yang datang dan runtuh. Negara-negara yang lemah biasanya bergabung dengan negara lainnya mencegah agar kekuatan dominan menjadi sangat kuat, yang dikenal dengan bentuk proaktif dari pelestarian perimbangan kekuatan (*balance of power*). Kompetisi ekonomi dan seringkali perang menjadi tanda dari era ini, beberapa negara seperti Inggris dan Perancis adalah negara kuat sampai dengan saat ini, tetapi beberapa negara kuat lainnya runtuh seiring waktu yaitu Kekaisaran Ottoman dan Spanyol.

Perbedaan mendasar mulai muncul sejak abad ke-19 dengan membawa dua perubahan besar di dalam sistem internasional:

- (1) Nasionalisme sebagai bentuk kekuatan, yang membuat negara bangsa itu tumbuh menjadi lebih kuat.

⁶ Penjelasan serupa dapat dilihat di website: <http://www.sparknotes.com/us-government-and-politics/political-science/international-politics/section1.rhtml>

(2) Itali dan Jerman bersatu, yang mengubah keseimbangan militer dan politik di Eropa.

Permasalahan muncul ketika bersatunya Itali dan Jerman yang berkontribusi kepada Perang Dunia I (1914-1918). Sistem internasional kembali berubah drastis setelah perang. Negara-negara kuat di Eropa banyak yang mengalami keterpurukan akibat perang, dan Amerika Serikat (AS) sendiri mulai keluar dari isolasinya dan berubah menjadi kekuatan global. Saat yang bersamaan, berakhirnya kekuatan Ottoman dan Austro-Hungarian menciptakan serangkaian negara-negara baru, dan munculnya komunisme di Rusia. Faktor-faktor ini menyebabkan munculnya Traktat Versailles, Nazi dan Komunisme, dan Perang Dunia II (1939-1945).

Pemerintahan baru muncul sejak berakhirnya Perang Dunia II. Setelah Perang, muncul dua kekuatan: AS dan Uni Soviet yang disebut sebagai sistem bipolar. Sejak berakhirnya Perang Dingin yaitu dengan runtuhnya Uni Soviet, maka AS menjadi negara tunggal menguasai sistem internasional yang disebut dengan unipolar. Namun demikian, ada sudut memandang lainnya yang melihat bahwa kekuatan ekonomi AS tidak begitu kuat sehingga tidak dapat dikatakan kendali perekonomian sepenuhnya di tangan AS sebab ada negara-negara ekonomi kuat lainnya seperti negara-negara di Asia sehingga menyebutnya menjadi multi polar.

Isu-isu global kontemporer tepatnya muncul ketika berakhirnya Perang Dingin dan/atau ketika sistem internasional modern berbentuk unipolar. Hal ini bisa dikatakan sebagai periode kedua dari *new order* (pemerintahan baru) dunia internasional. Peristiwa-peristiwa yang terjadi menjadi konteks di dalam isu-isu global kontemporer. Peristiwa yang paling dahsyat terjadi adalah peristiwa yang sering disebut dengan 9/11 atau *September attack*. Sebuah serangan yang diberitakan sebagai serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris Al Qaeda ke AS pada tanggal 11 September 2001. Korban yang ada adalah sekitar 2.999 orang, yang luka sekitar 6.000 orang dan 10 juta properti dan infrastruktur rusak.⁷ Dikatakan dahsyat di sini karena serangan dilakukan kepada pemegang kekuatan (unipolar) sistem internasional pada saat itu yaitu AS. Sebelumnya sudah ada peristiwa-peristiwa yang menjadi konteks dari isu global kontemporer seperti genosida di Rwanda dan Bosnia dan munculnya negara-negara baru di Eropa Timur.

Dengan terjadinya peristiwa 9/11 dan permasalahan genosida yang ditangani oleh dunia internasional menjadikan pemerintahan baru dunia

⁷ Matthew J. Morgan (ed), *The Impact of 9/11 on Politics and War: The Day that Changed Everything?*. (New York : Palgrave MacMillan, 2009)

memiliki satu ancaman yang memiliki karakter yang berbeda. Sifat dari ancaman kali ini bukan lagi berasal dari negara seperti yang dominan terjadi pada periode Perang Dingin melainkan aktor non-negara (*non-state actor*). Aktor non-negara sebagai pelaku dari penyebab ketidakamanan dunia menjadi semakin sulit diidentifikasi karena aktor seperti ini dapat juga berasal dari negara yang bersangkutan dan/atau dari dalam negara sendiri. Isu-isu internasional dalam hubungan internasional menjadi semakin kompleks sehingga disebut dengan isu global kontemporer. Pada era paska Perang Dingin ini ancaman bisa berarti wabah penyakit, *human trafficking*, narkoba, perdanganan senjata, kemiskinan, buta huruf, virus menular, yang dialami oleh beberapa negara bukan negara itu sendiri.

Dengan demikian, isu-isu global kontemporer adalah isu yang berkembang serta meluas setelah berakhirnya Perang Dingin tahun 1990-an. Isu-isu global kontemporer ini terkait pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat internasional di tatanan dunia baru (*new order*) yang dihadapkan pada persoalan-persoalan kesejahteraan yang berhubungan dengan keamanan manusia (*human security*). Bentuk ancaman keamanan pada era ini mengalami transformasi sehingga bentuk agenda keamanan internasionalnya juga menjadi baru, yaitu Agenda Baru Keamanan Global (*New Global Security Agenda*).

Pada tahun 2002, *US Department of State* di bawah *US Secretary of Global Affair*, Paula J. Dobriansky, mengeluarkan pernyataan (*statement*) yang dirilis di dalam websitenya⁸ mengenai *new global security* dengan sebelumnya merumuskan pengertian mengenai yang dimaksud dengan isu-isu global:

At this point, it is worth defining what I mean by global issues. Global issues are those issues that are not limited by borders or boundaries but that reach across international lines to affect us all. My global portfolio encompasses environment and science, refugees and migration, narcotics trafficking and law enforcement, human rights, and health matters. Though he was speaking in the first century B.C., the Roman poet Horace aptly described what could be called the crux of modern global affairs when he wrote, "Your own safety is at stake when your neighbor's wall is ablaze." The essence of global issues is a recognition that the people of the world are inexorably linked and that, in today's world, that which touches some touches all. Since September 11, never have we been more acutely aware that our own safety and the protection of our way of life must be guarded by due attention to international problems -- such as injustice and the inadequacy of the rule of law,

⁸ US Departement of State: of A new Global Security agenda; diakses pada tanggal 3 Februari 2017 di: <https://2001-2009.state.gov/g/rls/rm/2002/12381.htm>

poverty, disease, and repression. These are the blazing walls of today's world that threaten to engulf us. That is why these issues have become central to American foreign policy and our efforts to protect our national interests.

Pengertian AS mengenai isu-isu global sebagai isu-isu yang tidak terbatas pada masalah lintas batas tetapi juga mencakup internasional yang berdampak kepada AS yang melintasi permasalahan, mengenai lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan, *refugee* dan migrasi, penyeludupan narkoba dan penegakan hukum, hak asasi manusia dan kesehatan. AS menyadari bahwa sejak kejadian 9/11 permasalahan tidak menjadi sedemikian akut terkait keselamatan dan perlindungan tentang kehidupan. Permasalahan seperti yang tersebut tadi termasuk mengenai terorisme dan penyakit menjadi salah satu faktor bagi AS menyebutnya menjadi *new global security* agenda.

Macam dan Ciri Isu Global Kontemporer

Sebelumnya pada tahun 1996, terbit tulisan oleh *Institute for Security Studies*, yang mengidentifikasi beberapa sumber-sumber global dari ketidakamanan dan implikasinya terhadap formulasi kebijakan keamanan nasional. Terdapat delapan hal penting setelah Perang Dingin sebagai isu global strategis, yaitu obat-obatan (*drug*), migrasi, lingkungan hidup, populasi, tantangan global ekonomi, krisis demokrasi liberal, fusi dan pembelahan, dan *light weapon proliferation*.⁹ Di dalam tulisan tersebut dipaparkan bahwa terdapat sumber-sumber global ketidakamanan dan implikasinya untuk formulasi kebijakan keamanan nasional. Kedelapan isu ini kemudian menjadi klaster penting sebagai ancaman luar biasa untuk keamanan nasional dan regional dan puncaknya keamanan global.¹⁰ Hal ini kemudian ditambah dengan teradinya 9/11. Dengan demikian, ancaman dalam bentuk baru ini bukan berupa "serangan militer" yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain tetapi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh aktor non-negara (*non-state actor*) dan ditujukan kepada negara (*state actor*), individu atau warga negara yang mengancam keamanan umat manusia (*Human Security*).

⁹ Solomon, Husain; Towards the 21st Century: A New Global Security Agenda; di: http://dspace.africaportal.org/jspui/bitstream/123456789/31605/1/Paper_6.pdf?1 diakses tanggal 5 Februari 2017.

¹⁰ Solomon, Husain; Towards the 21st Century: A New Global Security Agenda

Obat-obatan (*Drugs*)

Korban domestik dari kecanduan narkoba sangat mengkhawatirkan. Ini termasuk hilangnya produktivitas, melonjaknya biaya kesehatan, kenaikan tajam dalam kejahatan terkait narkoba, dan penyebaran percepatan AIDS melalui jarum suntik yang terkontaminasi. Penggunaan narkoba bukan hanya merupakan fenomena sosial; keadaan ini memiliki dampak luas pada isu politik dan berimplikasi kepada aspek implikasi keamanan. Misalnya, di Amerika Latin ada hubungan yang cukup dekat antara pengedar narkoba dan kelompok-kelompok revolusioner kiri seperti Columbia M-19 dan Peru Sendero Luminoso (*Shining Path*).¹¹ Di Lebanon dan di tempat lain di Timur Tengah, di Balkan, Sebelah Selatan Republik bekas Uni Soviet, Burma (Myanmar) dan Sri Lanka, obat telah menjadi sumber utama dana untuk pergerakan (*movement*).¹²

Perdagangan narkoba juga dapat memengaruhi hubungan antara negara-negara. Sebagai contoh, alasan utama untuk tahun 1989 invasi Panama oleh AS adalah bahwa pemerintahan ini, di bawah pimpinan Jenderal Manuel Noriega, diduga melayani saluran untuk perjalanan obat ke AS.¹³ Hal yang terbaru, serangan terkuat Ross Perot terhadap Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), ia berpendapat bahwa pemberantasan tersebut adalah pembatasan akses bebas barang antara Meksiko dan AS dalam memungkinkan pedagang bebas obat-obatan yang lebih besar dalam arti mendistribusikan 'racun' mereka di Amerika Serikat.

Migrasi

Gerakan populasi terbesar dan paling dramatis pada tahun-tahun terakhir adalah terdapat kurang lebih 30 juta pengungsi dan orang terlantar (*Internal Displaced Persons (IDPs)*).¹⁴ Kerusakan politik, pergolakan sosial, dislokasi ekonomi dan bencana ekologis memiliki kontribusi terhadap pergerakan orang di seluruh batas nasional satu negara kawasan 'selatan' ke tempat lain. Sebagai akibatnya ada 3,2 juta warga Afghanistan di Pakistan

¹¹ Joseph J. Romm, *Defining National Security: The Nonmilitary Aspects* (New York: Council on Foreign Relations, 1993), 10.

¹² Sumita Kumar, "Drug-Trafficking in Pakistan," *Asian Strategic Review 1994-1995* (New Delhi: Institute For Defence Studies and Analysis, 1995), 194-195.

¹³ Sumita Kumar, "Drug-Trafficking in Pakistan," 195.

¹⁴ Nicholas Eberstadt, "Population Change and National Security," *Foreign Affairs*, Vol. 70, No. 3 (Summer 1991), 125.

dan 2,3 juta di Iran; 685.000 di Ethiopia dilaporkan telah mengungsi di Sudan, sementara itu juga ada 320.000 Somalia dan 384.000 Sudan yang di Ethiopia; dan selanjutnya 600.000 Ethiopia dilaporkan telah melarikan diri karena perang ke Somalia. 17 Perang Sipil dan kelaparan telah menyebabkan sepertiga penduduk Liberia (763.000 dari total populasi 2,4 juta) mengungsi ke negara tetangga Guinea, Sierra Leone dan Coast.

Perpindahan penduduk secara massal semakin menarik perhatian pembuat kebijakan kunci, tidak hanya untuk alasan kemanusiaan, tetapi juga karena mereka menciptakan instabilitas dalam negeri, menghasilkan ketegangan antar negara dan mengancam keamanan internasional. Afrika Selatan diperkirakan menerima delapan juta imigran ilegal, merupakan kasus yang terus meningkat pada satu titik.

Pada tahun 1994, biaya Afrika Selatan wajib pajak R1, 985 juta menjadi tuan rumah penduduk asing ilegal. Selain itu, terdapat hubungan timbal balik antara imigran ilegal dan penyebaran penyakit menular seperti AIDS, malaria, kolera dan TBC. Sumber kepolisian juga telah mencatat bahwa empat belas persen dari semua kejahatan di Afrika Selatan melibatkan imigran ilegal termasuk penjualan senjata, pencucian uang, dan *drug trafficking*.

Lingkungan Hidup

Memudarnya ketegangan militer Perang Dingin secara koinciden bersamaan dengan berkembangnya masalah keamanan yang nyata yang mengancam keamanan banyak negara dan memerlukan solusi internasional, antara lain lubang di lapisan ozon, efek rumah kaca, deforestasi, air yang langka, energi dan sumberdaya lainnya. Peningkatan bahaya lingkungan telah menggarisbawahi dua bentuk interaksi antar negara di dunia: kerjasama dan konflik.

Pada tahun 1940, David Mitrany membangun sebuah teori fungsional dalam hubungan internasional. Ia mengusulkan bahwa mengingat masalah umum yang dihadapi umat manusia di mana-mana maka kerjasama antar negara-negara harus diperbesar. Tema ini disambut dan diperbesar oleh para globalis pada 1980an dan 1990an—bahkan sampai mengusulkan pemerintahan dunia federal untuk Planet Bumi. Di jantung teori tersebut adalah gagasan bahwa gravitasi masalah-masalah global membutuhkan solusi global—mengakibatkan tingkat yang lebih besar dari kerjasama antara negara-negara di dunia. Misalnya, satu negara tidak bisa memecahkan masalah tersebut seperti pelebaran lubang di lapisan

ozon bumi; itu harus menjadi upaya gabungan seluruh planet. Pada satu tingkat kerjasama global, berbagi permasalahan bersama, dapat dilihat sebagai suatu cara antara lain seperti *KTT Rio Earth Summit*.

Potensi konflik berbasis sumberdaya adalah jelas dalam Perang Teluk 1990 dan 1991, yang pada dasarnya berkisar sumberdaya yang langka energi. Salah satu alasan utama bagi AS untuk terlibat dalam Perang Teluk itu ketergantungan pada minyak Teluk. Ketergantungan Amerika pada minyak Teluk Persia naik 500 persen antara tahun 1985 dan 1989. Dengan minyak 1990 menyumbang setengah dari defisit perdagangan AS\$100 billion. Jadi, ketika Saddam Hussein menyerbu Kuwait pada 2 Agustus 1990, Presiden Bush menjawab: *"Pekerjaan kita, cara hidup kita, kebebasan kita sendiri dan kebebasan negara sahabat di seluruh dunia semua akan menderita jika kontrol dari minyak dunia cadangan jatuh ke tangan Saddam Hussein ... Kita tidak bisa membiarkan tiran untuk berlatih pemerasan ekonomi. Keamanan energi adalah keamanan nasional dan kita harus siap untuk bertindak sesuai."*¹⁵

Populasi

Populasi dunia diperkirakan tumbuh dari 5,3 miliar pada tahun 1990 menjadi 6,2 miliar pada tahun 2000, dan 8,5 miliar pada tahun 2025. Tingkat pertumbuhan hampir satu miliar per dekade memberikan konsekuensi sosial budaya dan politik ekonomi lingkungan makam. Misalnya, masalah sumberdaya di negara-negara seperti Meksiko dan Mesir secara langsung terkait dengan pertumbuhan populasi. Sebuah draft laporan tentang konflik politik di El Salvador 1982 mencatat bahwa *"...penyebab dasar dari konflik ini adalah sebanyak lingkungan sebagai politik berasal dari masalah distribusi sumberdaya di tanah yang penuh sesak. El Salvador memiliki tingkat kepadatan populasi yang melebihi India."*

Di Afrika sendiri tercatat adanya hubungan timbal balik antara konflik di Rwanda dan fakta bahwa ia memiliki salah satu tingkat tertinggi kepadatan populasi dalam pertumbuhan Afrika. Populasi juga terlihat bertanggung jawab untuk dua-pertiga dari peningkatan karbon dioksida memasuki atmosfer antara tahun 1950 dan 1985, dengan demikian berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Ledakan populasi juga terdaftar sebagai salah satu faktor yang berkontribusi untuk terjadinya IDPs.¹⁶

Tantangan Ekonomi Global

¹⁵ Solomon, Husain; *Towards the 21st Century: A New Global Security Agenda*

¹⁶ Solomon, Husain; *Towards the 21st Century: A New Global Security Agenda*

Kebutuhan untuk merestrukturisasi ekonomi dunia berasal dari dua poin besar: perpecahan pertumbuhan utara-selatan dan persaingan ekonomi. Adanya perpecahan pertumbuhan ekonomi utara-selatan, dan dalam beberapa kasus ekspansi, adalah jelas terlihat. Hal ini disorot oleh fakta bahwa pihak terkaya dunia yang hanya dua puluh persen mengendalikan delapan puluh persen dari sumber-sumber perekonomian dunia. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa terkaya dunia adalah dua puluh persen sekarang artinya 150 kali lebih kaya daripada termiskin. Hal ini lebih lanjut yang perlu digarisbawahi adalah fakta 1,3 miliar manusia di negara-negara berkembang yang hidup dalam kondisi kemiskinan absolut.

Paling menyedihkan dari semua, itu dapat dilihat oleh fakta bahwa 34.000 anak-anak meninggal setiap hari di dunia karena kekurangan gizi dan penyakit. Kebutuhan untuk mengatasi masalah utara-selatan berasal tidak hanya dari alasan kemanusiaan, tetapi juga dari ancaman kemakmuran yang kemiskinannya semakin terekspos. Kelangkaan ekonomi dalam bentuk pasar global dan meningkatnya biaya produksi mengintensifkan persaingan ekonomi. Persaingan teknologi dan berbagai bentuk peperangan komersial telah menggantikan perlombaan senjata dari setelah Perang Dingin. Menurut politisi Jepang Isihara Shintaro, abad kedua puluh satu akan menjadi abad perang ekonomi. Jika hal ini terjadi maka keamanan internasional terancam. Blok kekuatan ekonomi yang besar telah dikembangkan di Pacific Rim dan Amerika Utara sebagai penyeimbang ke Uni Eropa (UE). Formasi ekonomi serupa juga telah dikembangkan di Afrika Tengah dan Amerika Selatan. Keberadaan formasi ekonomi besar perlu dan belum tentu berarti persaingan ekonomi melainkan saling melengkapi. Akan tetapi kelangkaan persaingan tersebut bisa berkembang dan sejarahnya bisa menjadi 'panas'.

Krisis Demokrasi Liberal

Berakhirnya pemerintahan komunisme gaya Soviet mengkonsolidasi posisi demokrasi liberal Barat. Sejak saat itu, telah ada persaingan ideologi yang disponsori negara. Jatuhnya sistem Soviet dibenarkan prinsip demokrasi liberal di mata banyak kalangan: Smith, Mill dan Keynes. Ide-ide Barat *triumphalism* dikemas dalam buku Francis Fukuyama berjudul *The End of History* dan *Last Man*. Paradigma demokrasi liberal tampak mutlak dalam dominasinya. Perkembangan paska 1989 tampak menunjukkan hal ini dimana penyesuaian struktural ekonomi program (ESAPs) diliberalisasi di banyak negara Afrika; angin multipartai liberal

demokrasi yang menyapu sebagian besar Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah dan Asia.¹⁷ Perkembangan selanjutnya di bekas blok Timur, yang telah melihat kebangkitan bekas Partai Komunis, tampaknya menyangkal gagasan ini.

Di Afrika Selatan pun, pluralisme politik telah mengalami beberapa kemunduran. Segera setelah kehancuran Tembok Berlin, lonjakan menuju demokrasi multipartai meningkat di Afrika Selatan. Sistem pemerintahan satu partai korup Kenneth Kaunda digantikan oleh Gerakan Frederick Chiluba untuk Multipihak Demokrasi (MMD). Di Malawi, pemerintahan despotik Presiden seumur hidup Hastings Kamuzu Banda berakhir secara damai ketika penduduk Malawi mengikuti pemilihan umum Banda dan Kongres Malawi-nya Partai (MCP) keluar dari kekuasaan, digantikan oleh pimpinan Front Demokratik Bersatu, Bakili Muluzi (UDF).

Di Lesotho, kekuasaan militer berakhir dan Partai Nasional Basotho kehilangan dominasi dalam pemilihan yang membawa Perdana Menteri Ntsu Mokhehle dan Basotholand-nya Kongres Partai (BCP) berkuasa. Di Afrika Selatan, kekuasaan minoritas kulit putih datang pada 27 April 1994—pemilu rasial inklusif pertama negara itu. Sementara itu, baik dari bekas koloni Portugis di wilayah ini, Angola dan Mozambik, mulai membuat transisi yang panjang dan sulit untuk pluralisme politik.

Fusi dan Pembelahan

Dua elemen yang paling bertentangan pada periode kontemporer adalah Fusi (*fusion*) dan Pembelahan (*Fision*)—damai datang bersama-sama dengan disintegrasi kekerasan masyarakat.

Mengenai *fusion*, budaya global baru lahir tampaknya mengambil bentuk. Jins denim dan CocaCola adalah bentuk yang bersifat universal. Jika Toshiba dan Toyota berada di New York, kemudian MacDonalddan Kentucky Fried Chicken akan ditemukan di Tokyo. Jika domba dimasak dan direbus di restoran di New Delhi, maka restoran mewah di London melayani kari panas dari India. Jika Michael Jackson dan Madonna menjadi sangat terkenal di Montevideo, Maputo atau Kuala Lumpur, maka kemudian Afrika Barat dan musik India diwakili oleh orang-orang seperti Manu Dibango dan Babu Shegal, yang pasti akan ditemukan bermain di diskotek Paris atau Manchester. Ini adalah kecenderungan budaya global yang baru lahir bahkan lebih dalam dari ini: HAM dan gender, silang geografis, politik dan budaya. Salah satu alasannya adalah

¹⁷ Solomon, Husain; *Towards the 21st Century: A New Global Security Agenda*

perkembangan komunikasi dan inovasi teknologi sehingga membuat lebih mudah wisata dan memungkinkan untuk siaran CNN mencapai 200 juta orang di sembilan puluh negara lain.

Fusi tampaknya bertentangan tren ini: sumberdaya yang langka, berbagai pertumbuhan penduduk tingkatan dalam masyarakat heterogen dan pertumbuhan resultan dari nasionalisme etnis merobek masyarakat terbelah. Ini telah terbukti di Rwanda dan Burundi antara Hutu dan Tutsi; antara Serbia, Kroasia dan Muslim di bekas Yugoslavia; dan antara Hindu, Sikh dan Muslim di India. Hal yang menjadi lebih menarik saat ini adalah masalah-masalah ini mulai muncul pada negara-negara barat dengan demokrasi liberalnya: mempertimbangkan pertumbuhan neo-Nazisme di Jerman; meningkatnya nasib Front Nasional Jean-Marie le Pen di Prancis; gerakan separatis menyegarkan di Quebec; Catalonia; negara Basque; Corsica; Lombardy; Skotlandia dan Wales; dan meningkatkan ketegangan antara Flemings dan Walloons di Belgium. Tidak terkecuali, di AS terjadi kerusuhan tahun 1992 di Los Angeles dan pertumbuhan gerakan nasionalis etnosentris.

Produksi Senjata Ringan

Yang dimaksud dengan senjata ringan merujuk kru-portabel dan persenjataan darat. Definisi termasuk senjata kecil seperti pistol, senapan, senapan serbu dan senapan sub mesin; dan senapan mesin menengah; senapan mesin berat (HMG) dengan kaliber tidak melebihi 14,5 mm; rudal anti-pesawat dan anti-tank; mortir ringan; tambang dan granat.

Bahaya proliferasi senjata ringan bagi perdamaian dunia digarisbawahi oleh kenyataan bahwa di tahun 1994, konflik bersenjata utama sedang dilancarkan di 27 negara di seluruh dunia dan senjata adalah penyebab kematian luar biasa dari senjata ini. Keberadaan senjata ringan ini kemungkinan adalah hal yang paling rapuh di negara dunia ketiga karena ketidakseimbangan kekuasaan seperti pemberontak, perdagangan obat dan penjahat lainnya. Misalnya, gerilyawan di Kashmir melawan India menggunakan Soviet Kalashnikov, di Pakistan, senjata ringan memperburuk konflik etnis antara mohajirs, Pakistan Punjabi, Pathan dari Barat laut Provinsi Frontier (NWFP) dari Pakistan dan Sindis.

Bagi negara-negara Dunia Ketiga, isu-isu yang terkait dengan ancaman keamanan dalam bentuk baru (*Human Security*) ini merupakan "ancaman keamanan yang nyata" karena memiliki relevansi dengan kondisi domestik Negara-negara Dunia Ketiga yang masih disibukkan

oleh berbagai persoalan mengenai: 1) Situasi transisi politik; 2) Lemahnya kekuasaan pemerintah akibat tidak maksimalnya upaya penegakan hukum; 3) Ketidakpastian politik; 4) Krisis ekonomi; 5) Masalah konflik di wilayah perbatasan; 6) Konflik etnis dan konflik komunal dengan berbagai dimensi internasionalnya; 7) Persoalan disintegrasi bangsa; 8) Peningkatan jumlah pelaku terorisme; 9) Kemampuan melakukan tindakan ancaman terhadap *human security*, dsb.

Berkembangnya teknologi, terutama teknologi informasi, menjadi salah satu alasan kuat meluasnya isu global kontemporer ini sehingga mengakibatkan pergeseran sifat isu global dari sebelum Perang Dingin. Akibat berkembangnya ancaman yang memiliki jenis berbeda dari sebelum Perang Dingin, maka isu-isu global kontemporer memiliki kekhususan:

1. Nonkonvensional;

Dalam arti isu global kontemporer adalah hal yang bukan bersifat persenjataan dan/atau persaingan persenjataan.

2. Nontradisional;

Artinya kategori isu tersebut tidak bersifat antar negara.

3. Nonmiliter;

Seperti halnya yang sudah disinggung sebelumnya bahwa wabah penyakit, dan/atau *drugs* dapat menjadi ancaman.

4. Multidimensional; dan

Isu bersifat kompleks seperti permasalahan mengenai kemiskinan.

5. Transnasional

Isu yang diangkat dalam global kontemporer adalah lintas batas negara seperti migrasi, *refugee*, dan lain-lain.

Dengan demikian, karakteristik isu-isu global kontemporer sebagai ancaman keamanan nontradisional adalah:

1. Isu global kontemporer yang merupakan ancaman keamanan bersifat nontradisional tersebut tidak terpusat pada satu negara tertentu saja. Dengan demikian, ancaman yang merupakan bagian dari isu-isu global kontemporer ini tak hanya dihadapi oleh satu negara, tetapi telah mengancam sejumlah negara sekaligus (memiliki dimensi regional dan global). Oleh karena itu, isu-isu global kontemporer sering disebut sebagai "ancaman keamanan transnasional".
2. Isu global kontemporer tidak terfokus pada suatu lokasi geografis tertentu saja. Berdasarkan karakter geografisnya, isu-isu ini

seringkali sulit “dikenali” karena sifatnya yang melewati batas-batas antar negara hingga batas-batas regional (transnasional).

3. Isu-isu global kontemporer tidak dapat dihadapi hanya dengan kekuatan militer semata. Memang kekuatan militer dapat digunakan dalam eskalasi yang mengarah pada konflik bersenjata. Akan tetapi, kekuatan militer pada jangka panjang tak dapat lagi digunakan secara efektif untuk mengatasi ancaman isu-isu global tersebut.
4. Persoalan keamanan yang menjadi isu-isu global kontemporer telah mengancam eksistensi suatu negara maupun individu-individu yang merupakan bagian dari negara tersebut.

Hal yang paling jelas terlihat adalah bahwa dalam berkembangnya isu global kontemporer adalah munculnya istilah baru dalam merespon ancaman yang dihadapi yaitu keamanan manusia (*human security*).

Isu Global Strategis dan Keamanan Nasional dalam Teori Hubungan Internasional

Isu global strategis dan keamanan nasional dalam teori hubungan internasional terbagi ke dalam dua bagian besar: 1) sudut pandang kenegaraan (*state centric point of view*); dan 2) sudut pandang lintas batas negara (*global cross cutting issues*). Pada sudut pandang kenegaraan terbagi antara pertarungan paham realisme dan institusionalisme dimana paham realisme menitikberatkan pada kepentingan nasional sementara paham institusionalisme memusatkan perhatian pada rezim yaitu teori rezim. Sementara itu terdapat teori lintas batas negara yang dipelopori oleh Wendt berupa teori konstruktivisme dan Joseph Nye berupa teori transnasionalisme. Di dalam teori lintas batas ini mengangkat isu globalisasi sebagai salah satu faktornya.

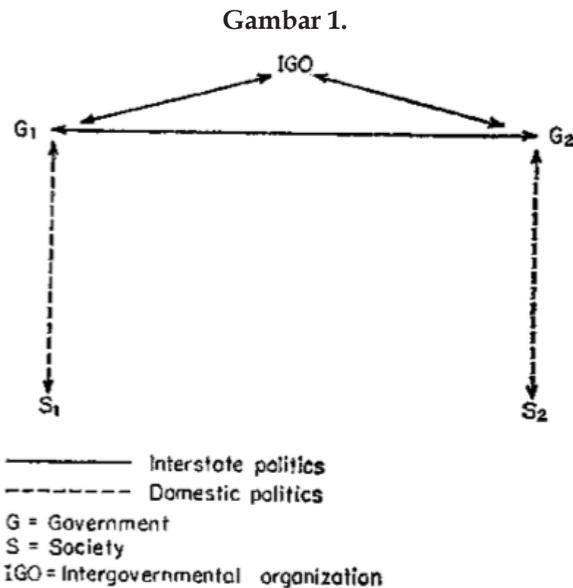
Joseph Nye dalam teorinya menyebutkan bahwa yang disebut dengan global interaksi adalah pergerakan informasi, uang, barang, benda-benda tangible dan tidak tangible di luar batas negara.¹⁸ Dia membagi menjadi empat macam interaksi global: 1) komunikasi; 2) transportasi; 3) uang; 4) wisata.¹⁹ Interaksi tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu interaksi antar negara (*interstate communication*) dan komunikasi transnasional. Komunikasi antar negara adalah jenis komunikasi dalam hubungan

¹⁸ Joseph S. Nye and Robert O. Keohane, “Transnational Relations and World Politics: An Introduction,” *International Organization*, Vol. 25, Issue 03 (1971), 332.

¹⁹ Joseph S. Nye and Robert O. Keohane, “Transnational Relations and World Politics: An Introduction,” 332.

internasional yang dilakukan sepenuhnya atas kendali pemerintah negara bangsa. Sementara itu, komunikasi transnasional adalah jenis komunikasi dalam hubungan internasional yang sudah mulai melibatkan aktor non negara.

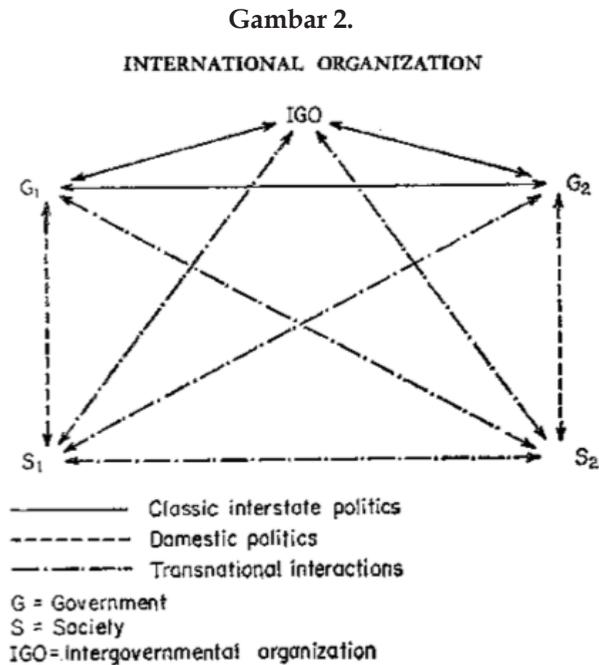
Bentuk komunikasi antar negara adalah jenis klasik yang disebut juga memiliki paradigma yang klasik. Interaksi ini berfokus kepada pemerintah sebagai agen dimana masyarakat berhubungan dengannya secara politik. Politik antar negara ini berbeda dengan – walaupun dapat dihubungkan secara tidak langsung – politik domestik. Bentuk komunikasi transnasional dalam jenis ini tidak diperhitungkan. Jenis komunikasi seperti ini digambarkan dalam bentuk bagan di bawah ini oleh Nye dan Keohanne:²⁰



Berbeda dengan bentuk interaksi antar negara, interaksi transnasional dapat melibatkan pemerintah, namun dapat juga tidak melibatkan. Aktor non-negara memainkan peranan penting dalam interaksi ini. Berbicara interaksi transnasional, maka berbicara mengenai keuangan, wisata dan komunikasi yang dalam beberapa hal dapat melibatkan aktor negara sebagai contoh untuk melewati batas negara lain. Dengan demikian, Nye dan Keohanne menyebut interaksi transnasional sebagai suatu istilah untuk menggambarkan pergerakan barang (*tangible items*)

²⁰ Joseph S. Nye and Robert O. Keohane, "Transnational Relations and World Politics: An Introduction," 333.

dan jasa (*intangible items*) lewat lintas batas negara ketika minimal satu aktornya bukan merupakan aktor negara dan/atau organisasi antar negara.²¹ Nye dan Keohanne mengangkat definisi yang dibawa oleh J. David Singer yang menyebutkan bahwa individu dan/atau organisasi dapat mempunyai peran di dalam politik dunia: 1) mereka bisa terlibat di dalam suatu koalisi yang mengendalikan dan memengaruhi negaranya; 2) mereka memainkan peranannya secara langsung berhadapan (*vs*) dengan kebikan luar negeri dan/atau masyarakat luar negeri yang tidak melalui (*by pass*) pemerintah negaranya.²² Nye dan Keohanne berpendapat bahwa interaksi transnasional masuk dalam dan/atau lebih tepatnya ada dalam tipe kedua dari penjelasan Singer. Keohanne dan Nye kemudian menggambarkan bentuk interaksi transnasional sebagai berikut guna membedakan dengan bentuk internasi antar negara (*interstate*):



Di dalam era globalisasi paska perang dunia, yang melibatkan isu global kontemporer hubungan interasional, maka interaksi yang banyak terjadi adalah berjenis transnasional. Hal ini tidak terlepas dari adanya

²¹ Joseph S. Nye and Robert O. Keohane, "Transnational Relations and World Politics: An Introduction," 333.

²² J. David Singer, "The Global System and Subsystems: A Developmental View", in James N. Rosenau (ed), *Linkage Politics: Essays on the Convergence of National and International System* (New York: Free Press; London; Collier-MacMillan, 1969), 24.

berbagai teknologi yang ditemukan terutama teknologi komunikasi. Setiap individu dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat internasional dan/atau organisasi bangsa-bangsa seperti PBB. Beberapa efek yang digambarkan oleh Keohanne dan Nye yang terjadi dalam jenis interaksi ini yang pada intinya adalah meningkatnya sensitivitas antar masyarakat yang berarti mengubah bentuk hubungannya dengan pemerintah.²³

Dengan adanya komunikasi massal global, kelompok yang bermacam-macam dari masyarakat yang berbeda, seperti mahasiswa radikal, aparat militer, atau etnis minoritas, dapat mengobservasi perilaku satu dan lainnya dan kemudian mengambilnya menjadi bentuk tindakannya. Dengan demikian, mahasiswa radikal dapat membuat taktik dan tuntutan politik tanpa ada kontak langsung. "Konsiprasi" internasional mereka dilakukan secara publik dan disebarakan dengan bantuan media khusus.²⁴ Pelaku dalam fenomena global ini dapat dihukum, tetapi skalanya, ruang lingkungannya dan kecepatannya adalah produksi dari televisi global.

Secara singkat, Keohanne dan Nye menyimpulkan bahwa efek yang ditimbulkan dari interaksi transnasional adalah: 1) perubahan perilaku; 2) pluralisme internasional; 3) meningkatnya pembatasan suatu negara; 4) meningkatnya kemampuan negara memengaruhi pihak lain; dan 5) munculnya aktor mandiri dengan kebijakan luar negeri beranah privat yang dapat secara langsung menentang atau menolak kebijakan pemerintahannya.²⁵

Hal yang paling nyata terlihat pada kenyataan dimana seorang individu dalam keluarga, organisasi terkecil dalam negara, bahkan tidak memiliki kendali atas apa yang diakses oleh anggota keluarganya dengan adanya teknologi internet. Ini kemudian menjadi hal yang serupa terjadi pada tataran negara. Dengan demikian kontrol negara menjadi melemah dan tantangan terhadap keamanan nasional menjadi menguat. Bentuk ancaman menjadi semakin kompleks karena teknologi informasi dapat menyasar tingkat individu dan memengaruhi tindakan mereka dengan *by pass* pemerintahan negara. Apakah berarti negara harus otoriter dan atau ada bentuk baru?

²³ Joseph S. Nye and Robert O. Keohane, "Transnational Relations and World Politics: An Introduction," 337.

²⁴ Joseph S. Nye and Robert O. Keohane, "Transnational Relations and World Politics: An Introduction," 337.

²⁵ Joseph S. Nye and Robert O. Keohane, "Transnational Relations and World Politics: An Introduction," 337.

Bentuk Strategi Keamanan Komprehensif: Tawaran Perserikatan Bangsa-Bangsa

Terhadap tantangan yang dihadapi oleh dunia internasional saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menawarkan suatu jalan keluar. Selama dua dekade ini, komunitas internasional telah bekerja untuk mencari pengertian yang luas mengenai yang disebut dengan keamanan. Meminta masukan dari pihak pemerintah, akademisi, kelompok masyarakat dan organisasi antar negara, PBB mengadakan pertemuan yang disebut dengan *2000 Millennium Summit* untuk dunia “bebas keinginan” dan “bebas dari ketakutan”. Hasil dari pertemuan tersebut, maka terbentuklah pengertian dan/atau masukan mengenai keamanan kemanusiaan (*human security*).

Pada tahun 2001, PBB kemudian membuat satu unit khusus mengenai keamanan kemanusiaan yang disebut dengan Komisi Keamanan Kemanusiaan (*the Commission of Human Security*) dan atau disingkat CHS. Komisi ini terdiri dari dua belas tokoh internasional dunia di antaranya Sadako Ogata—sebelumnya menjabat sebagai Komisioner PBB untuk Pengungsi (*former UN High Commissioner for Refugees*)—dan Professor Amartya Sen (peraih nobel tahun 1998). Keamanan kemanusiaan ini kemudian membuat fokus kembali atas perhatian negara-negara dan komunitas internasional mengenai keberlanjutan hidup, penghidupan, dignitas orang sebagai basis untuk mendapatkan perdamaian, perkembangan dan progres manusia.

Ketika keamanan kemanusiaan tetap menjadi hal yang vital dalam stabilitas dan perdamaian, kompleksitas dan keterkaitan dengan ancaman lama dan baru—dari kemiskinan kronik dan berkelanjutan, ke konflik kekerasan, perubahan iklim, *human trafficking*, kesehatan, dan krisis finansial—muncul kerentanan bersama atas berkembangnya risiko ancaman menyebar dan *cross cutting*. Oleh karena tantangan dapat berkembang dengan sangat cepatnya di dalam dan melintas bangsa dan memberikan krisis yang sangat kuat, keamanan kemanusiaan menekankan kepada kebutuhan akan kerangka baru yang mengkombinasikan agenda keamanan dan perdamaian, perkembangan dan hak asasi manusia dalam bentuk yang lebih efektif, efisien, dan proses yang berorientasi pencegahan. Berikut pernyataan PBB yang disebut di dalam dokumennya:

While national security remains pivotal to peace and stability, the complexity and interrelatedness of old and new threats—from chronic and persistent poverty, to violent conflicts, climate change, human trafficking, health pandemics, and economic and financial crises—reveal our shared vulnerabilities to a growing risk of threats that are

widespread and cross-cutting. Because these challenges can spread rapidly within and across nations and give rise to more intractable crises, human security emphasizes the need for a new framework that combines the agendas of peace and security, development and human rights in a more effective, efficient and prevention-oriented manner.²⁶

Selanjutnya kemudian CHS memberikan definisi mengenai keamanan kemanusiaan sebagai berikut;

“...to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human freedoms and human fulfillment. Human security means protecting fundamental freedoms—freedoms that are the essence of life. It means protecting people from critical (severe) and pervasive (widespread) threats and situations. It means using processes that build on people’s strengths and aspirations. It means creating political, social, environmental, economic, military and cultural systems that together give people the building blocks of survival, livelihood and dignity.”²⁷

Dalam bahasa Indonesianya dapat disingkat bahwa keamanan kemanusiaan adalah untuk melindungi inti vital dari hidup manusia dengan cara peningkatan kebebasan manusia dan pemenuhan kebutuhan kemanusiaannya. Argumentasi dari CHS mengenai pentingnya keamanan kemanusiaan ini, sedikit sudah disinggung sebelumnya, secara rinci disebutkan berikut ini:

As argued by the Commission on Human Security (CHS), the need for a new paradigm of security is associated with two sets of dynamics:

First, human security is needed in response to the complexity and the interrelatedness of both old and new security threats – from chronic and persistent poverty to ethnic violence, human trafficking, climate change, health pandemics, international terrorism, and sudden economic and financial downturns. Such threats tend to acquire transnational dimensions and move beyond traditional notions of security that focus on external military aggressions alone.

Second, human security is required as a comprehensive approach that utilizes the wide range of new opportunities to tackle such threats in an integrated manner. Human security threats cannot be tackled through conventional mechanisms alone. Instead, they require a new consensus that acknowledges the linkages and the interdependencies between development, human rights and national security.

²⁶ Human Security Unit: Human Security at the United Nations, New York, 2012.

²⁷ United Nations Trust Fund for Human Security; Human Security in Theory and Practice, lihat selanjutnya di http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org/humansecurity/files/human_security_in_theory_and_practice_english.pdf pada tanggal 1 Desember 2016.

Pada intinya, definisi yang diberikan oleh CHS mengkonseptualisasikan kembali keamanan dengan isunya yang paling fundamental:

- (1) bergerak menjauh dari tradisional, konsepsi negara-sentris keamanan yang difokuskan terutama pada keamanan negara dari agresi militer, satu yang berkonsentrasi pada keamanan individu, perlindungan dan pemberdayaan mereka;
- (2) menarik perhatian banyak ancaman yang melintasi berbagai aspek kehidupan manusia dan dengan demikian menyoroti antarmuka antara keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia; dan
- (3) mempromosikan hal yang baru terintegrasi, terkoordinasi dan berpusat pada pendekatan manusia (*people center*) untuk memajukan perdamaian, keamanan dan pembangunan di dalam dan di negara-negara.

Keamanan manusia menyatukan ‘unsur manusia’ dalam keamanan, hak dan pembangunan. Dengan demikian, itu adalah konsep antar-disiplin yang menampilkan karakteristik sebagai berikut: 1) berpusat pada manusia; 2) multi-sektoral; 3) komprehensif; 4) konteks khusus; dan 5) pencegahan berorientasi.

Sebagai konsep yang berpusat pada manusia, keamanan manusia menempatkan individu di ‘pusat analisis’. Akibatnya, menganggap berbagai kondisi yang mengancam kelangsungan hidup, mata pencaharian dan martabat, dan mengidentifikasi ambang bawah hidup manusia yang tidak dapat ditolerir, terancam. Keamanan manusia juga didasarkan pada pemahaman multi-sektoral ketidakamanan. Oleh karena itu, keamanan manusia memerlukan pemahaman yang diperluas dari ancaman dan termasuk penyebab ketidakamanan yang berkaitan, misalnya untuk ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, masyarakat dan keamanan politik.

Saling ketergantungan ini memiliki implikasi penting bagi pembuatan kebijakan seperti itu menunjukkan bahwa ketidakamanan manusia tidak dapat ditangani secara terpisah melalui tanggapan yang berdiri sendiri terpecah-pecah. Sebaliknya, keamanan manusia melibatkan pendekatan komprehensif yang menekankan perlunya tanggapan multi sektoral yang mempertemukan agenda yang berhubungan dengan keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia. “Dengan keamanan manusia (seperti) tujuan, harus ada respon lebih kuat dan lebih terintegrasi dari masyarakat dan negara di seluruh dunia.”

Tabel 1.

1992	<i>Agenda for Peace</i>	UN Secretary General Boutros-Boutros Ghali's call for "an integrated approach to human security" to address root causes of conflict, spanning economic, social and political issues.
1994	Human Development Report	Debut of human security, broadly defined as 'freedom from fear and freedom from want' and marking the move from a state-centric to a human-centric security paradigm.
	1999 Millennium Declaration	UN Secretary General Kofi Annan calls the international community to work towards achieving the twin objectives of 'freedom from fear' and 'freedom from want'.
1999	United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS)	In March 1999 the Government of Japan and the UN Secretariat launch the UNTFHS to finance UN human security projects and increase human security operational impact.
	Human Security Network (HSN)	Launch of the HSN at the initiative of Canada and Norway. The HSN comprises a group of like-minded countries from all regions of the world committed to identifying concrete areas for collective action in the area of human security.
2001	Commission on Human Security (CHS)	Establishment of the independent Commission on Human Security under the chairmanship of Sadako Ogata and Amartya Sen.
2003	<i>Human Security Now</i>	The CHS publishes its final report <i>Human Security Now</i> , defining human security as: "to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human freedoms and human fulfillment".
2004	Human Security Unit (HSU)	Establishment of the HSU at the UN Secretariat
2004	UN Secretary General's <i>High-level Panel on Threats, Challenges and Change</i>	Recognition of the interconnectedness of a wide range of new threats to human security (economic and social threats; interstate conflict and rivalry; internal violence, including civil war; state collapse and genocide; nuclear, radiological, chemical and biological weapons; terrorism; and transnational organized crime) and the need for greater cooperation and partnerships to address them.
2005	<i>In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All</i>	Report of the UN Secretary General setting a series of policy priorities and proposing a number of institutional reforms to achieve the three goals of 'freedom from want', 'freedom from fear' and 'freedom to live in dignity'.
2005	2005 World Summit Outcome Document	Heads of States and Governments refer to the concept of human security. Paragraph 143 of the Document recognized that: "all individuals, in particular vulnerable people, are entitled to freedom from fear and freedom from want, with an equal opportunity to enjoy their rights and fully develop their human potential".
2006	Friends of Human Security (FHS)	The FHS, "a flexible and open-ended informal group of supporters of human security" consisting mainly of representatives from UN member states and international organizations working at the UN headquarters in New York., holds its first of four meetings in NY under the chairmanship of Japan.
2008	UN General Assembly: Thematic Debate on Human Security	Debate to reflect on the multidimensional scope of human security and to further explore ways to follow up on its reference in the World Summit Outcome Document.

Selain itu, sebagai konsep konteks yang spesifik, keamanan manusia mengakui bahwa ketidakamanan bervariasi di seluruh pengaturan yang berbeda dan sebagai solusi kemajuan seperti kontekstual yang responsif terhadap situasi tertentu mereka berusaha untuk mengatasinya. Akhirnya, dalam menangani risiko dan akar penyebab ketidakamanan, keamanan manusia adalah pencegahan yang berorientasi dan memperkenalkan fokus ganda pada perlindungan dan pemberdayaan.

Pada perkembangannya, pendekatan keamanan kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB sudah melalui beberapa proses seperti digambarkan dalam Tabel 1.

Penutup

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keamanan nasional dalam konteks isu global kontemporer pada prespektif hubungan internasional adalah hal yang kompleks, karena ancaman pada tataran individual menjadi nyata. Hal ini kemudian dijelaskan dalam teori transnasional dalam hubungan internasional. Pada perkembangannya, PBB kemudian memberikan tawaran untuk mengkonseptualisasi kembali pengertian keamanan nasional yang pada akhirnya memberikan masukan mengenai keamanan kemanusiaan (*human security*).

Berbagai hal yang sudah dilakukan oleh PBB terkait keamanan kemanusiaan. Akan tetapi, tantangan yang paling nyata juga tetap datang jika dibenturkan kepada teori hubungan internasional yang paling klasik yaitu realisme mengenai negara *super power*. Sejauh mana keterlibatan negara *super power* dapat secara tulus terlibat dalam perkembangan isu tanpa ada unsur keterlibatan kepentingan nasional di dalamnya, minimal mendukung konsepsi ini.

Daftar Pustaka

- Allyn, David. *Make Love, Not War: The Sexual Revolution: An Unfettered History*. Boston: Little Brown and Company, 2000.
- Brivati, Brian. "Introduction." Dalam *The contemporary history handbook*, oleh Brian Brivati, Julia Buxton, & Anthony Seldon, xvi. Manchester: Manchester University Press, 1996.
- Dobriansky, Paula J. "A New Global Security Agenda." *U.S. Department of State*. 10 Juni 2002. <https://2001-2009.state.gov/g/rls/rm/2002/12381.htm> (diakses 3 Februari 2017).
- Eberstadt, Nicholas. "Population Change and National Security." *Foreign Affairs* Vol 70, no. 3 (1991): 115-131.
- Human Security Unit. *Human Security at the United Nations*. Newsletter - Issue 12, New York: United nations, 2015.
- Kumar, Sumita. "Drug Trafficking in Pakistan." *Asian Strategic Review 1994-1995* (Institute for Defence Studies and Analyses), 1995: 194-195.

- Mitford, William. "The History of Greece." Dalam *Edinburgh review*, Volume 12, oleh Sydney Smith, 480. London: Archibald Constable & co. Edinburgh, 1808.
- Morgan, Matthew J. (Ed.). *The Impact of 9/11 on Politics and War: The Day that Changed Everything?* New York: Palgrave Macmillan, 2009.
- Nye, Joseph S., and Robert O. Keohane. "Transnational Relations and World Politics: An Introduction." *International Organization* Vol 25, no. 3 (1971): 329-349.
- Romm, J.J. *Defining National Security: The Nonmilitary Aspects*. New York: Council on Foreign Relations Press, 1993.
- Singer, J. David. "The global system and its subsystems: a developmental view." *Linkage Politics*, 1969: 21-43.
- Solomon, Hussein. "Towards the 21st Century: A New Global Security Agenda?" *Occasional Paper No 6*. Pretoria: Institute for Security Studies, 1996.
- Sparknotes. *History of the International System*. <http://www.sparknotes.com/us-government-and-politics/political-science/international-politics/section1.rhtml> (diakses 13 Februari 2017).
- United Nations trust for Human Security. "Human Security in Theory and Practice; An Overview of the Human Security Concept and the." *United Nations*. 2009. http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/human_security_in_theory_and_practice_english.pdf (diakses 1 Desember 2016).